

Kajian Preferensi Angkutan Umum di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Tania Andari* dan Dwi Widiyanti

*Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta, Indonesia, 10110*

**andari.t@gmail.com*

Diterima: 20 Mei 2019, Direvisi: 30 Mei 2019, Disetujui: 7 Juni 2019

ABSTRACT

Public Transportation Preference Study in Pelaihari City Tanah Laut Regency: Public transportation is the community's need to move from one place to another. In carrying out daily trips, Pelaihari City people still use private cars or motorbikes. To unravel congestion in the city of Pelaihari, the government wants to provide public transportation in Pelaihari City. The purpose of this study was to determine the characteristics of appropriate public transportation for Tanah Laut District. This research uses quantitative descriptive method by collecting data using interview respondents using questionnaires and field observations. By using a sample of 100 respondents based on the Slovin formula and analyzing community preferences it was found that 1) the Pelaihari City community agreed to the existence of the provision of public transportation services with a fixed and regular route and was also willing to switch to using public transportation 2) the type of transportation desired was a bus medium, small buses and public passenger cars with public transport stops at bus stops.

Keywords: public transportation; Slovin Formula; urban preferences.

ABSTRAK

Angkutan umum merupakan kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam melakukan perjalanan sehari-hari masyarakat Kota Pelaihari masih menggunakan mobil atau motor pribadi. Guna mengurangi kemacetan di kota Pelaihari, pemerintah hendak menyediakan transportasi angkutan umum di Kota Pelaihari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik angkutan umum yang tepat untuk Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan wawancara responden menggunakan kuisioner dan observasi lapangan. Dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden berdasarkan rumus Slovin dan dilakukan analisa preferensi masyarakat ditemukan bahwa 1) masyarakat Kota Pelaihari setuju adanya akan adanya penyediaan pelayanan angkutan kota dengan trayek tetap dan teratur dan juga bersedia beralih menggunakan angkutan umum tersebut 2) jenis angkutan yang diinginkan adalah bus sedang, bus kecil dan mobil penumpang umum (MPU) dengan titik pemberhentian angkutan umum di halte.

Kata Kunci: angkutan umum; Rumus Slovin; preferensi masyarakat.

I. Pendahuluan

Sebagai kota yang belum memiliki angkutan umum maka dalam menentukan pola pergerakan perjalanan dilakukan survei pada karakteristik pelaku perjalanan yang sesuai dengan masyarakat di Kecamatan Pelaihari. Dengan memiliki luas wilayah sekitar 3.631,35 km² dan berpenduduk sebanyak 324.283 jiwa (BPS, 2016), Kota Pelaihari merupakan daerah pusat kegiatan di Kabupaten Tanah Laut. Bila ditinjau dari kondisi transportasi saat ini, wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki lokasi yang strategis dalam transportasi darat dan laut karena merupakan jalur lintas Trans Kalimantan bagian barat, yang menghubungkan Kota Banjarmasin dan wilayah tengah serta barat Provinsi Kalimantan Selatan dengan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, bahkan merupakan jalur alternatif menuju ke Provinsi Kalimantan Timur dengan melewati wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kotabaru hingga Kabupaten Pasir di Provinsi Kalimantan Timur (RPJM PU, 2017).

Jumlah penduduk Kecamatan Pelaihari pada BPS berjumlah 74.372 orang, untuk mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut Sugiyono (2017). Dengan menggunakan 10% error tolerance maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Didapat 98% masyarakat Kota Pelaihari setuju akan penyediaan pelayanan angkutan kota dengan trayek tetap dan teratur. Mereka tidak hanya setuju akan penyediaan angkutan umum penumpang oleh pemerintah, namun mereka juga bersedia untuk beralih menggunakan angkutan umum tersebut.

Berdasarkan hasil perjalanan yang dibangkitkan dan perjalanan yang ditarik ke setiap zona, diketahui

bahwa Kota Pelaihari merupakan Kota tujuan dari perjalanan orang yang berdomisili diluar Kota Pelaihari sehingga menyebabkan pola perjalanan orang secara *commuter* (perjalanan rutin/bolak-balik). Hal ini disebabkan oleh Kota Pelaihari secara geografis merupakan Ibu Kota Kabupaten Tanah Laut sehingga mempunyai fungsi pelayanan pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan.

Untuk meramalkan jumlah perjalanan tahun rencana, peneliti menghitung bangkitan perjalanan Kota Pelaihari untuk 5 tahun mendatang yaitu tahun 2022. Diperkirakan pada tahun 2022 jumlah penduduk meningkat sehingga penentuan jenis angkutan berdasarkan ukuran kota dan trayek umum diketahui bahwa jenis angkutan untuk kecamatan pelaihari hingga tahun 2022 masih sama dengan tahun eksisting yaitu bus sedang, bus kecil dan MPU (hanya roda empat).

Adapun aturan yang mengatur mengenai angkutan umum yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 139, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota. Dan penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pasal 148 yakni dalam penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam Pasal 14 angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang atau barang yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Pemerintah atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum dan Pasal 15 pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor dalam Trayek menyatakan Pasal 2 bahwa standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan,

keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan dan Pasal 7 untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, perusahaan angkutan umum melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Kajian sejenis terdahulu yang pernah dilakukan antara lain:

1. Zainal Abidin (2017), Studi Teknis Kebutuhan Angkutan Antar Jemput Dalam Propinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini membahas kebutuhan angkutan penumpang dari kota-kota di Propinsi Kalimantan Selatan ke Bandara Internasional Syamsudin Noor. Melakukan analisa keinginan masyarakat melalui metode *stated preference* dan melakukan analisa potensi penumpang pada setiap rute pelayanan angkutan Antar Jemput Dalam Propinsi (AJDP). Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar penumpang menginginkan adanya pilihan jenis layanan angkutan bandara yang lebih baik. Walaupun pada dasarnya rencana penyediaan pelayanan Angkutan Antar Jemput Dalam Propinsi di Bandara Syamsudin Noor merupakan pengembangan dari angkutan yang selama ini sudah ada, baik yang berijin maupun tidak, yang selama ini dikenal dengan angkutan “travel” maupun angkutan “sewa”. Angkutan tersebut melayani calon penumpang moda pesawat terbang dari kota asal ke bandara atau sebaliknya dari bandara ke kota tujuan.
2. Budi Dwi Hartanto (2018), Penetapan Trayek Angkutan Umum Berbasis Jalan DI Pulau Nunukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam rangka rangka penetapan trayek angkutan umum berbasis jalan, sehingga tercipta suatu sistem transportasi yang handal dan memadai di Pulau Nunukan. Dengan melakukan analisa berdasarkan analisa tata ruang, batas terluar daerah pelayanan dan analisa pola pergerakan penumpang angkutan umum, maka terdapat enam desa/kelurahan di Pulau Nunukan yang mendapatkan pelayanan angkutan dan jaringan trayek angkutan umum berbasis jalan di Pulau Nunukan yang layak ditetapkan adalah terdiri dari dua trayek yaitu trayek A yang melayani dari PLBL Liem Hie Djung sampai GOR Indoor Sungai Sembilang dengan panjang rute 5,83 km. Dan trayek B yang melayani dari Stadion Sepak Bola Sungai Bilal sampai SMA N 1 Nunukan dengan panjang rute 8,06 km.

Dari Kedua kajian terdahulu tidak ada yang meninjau prefensi masyarakat mengenai angkutan umum di kota Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut. Pada kajian ini akan dibahas secara mendalam mengenai preferensi masyarakat terhadap angkutan umum di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

II. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, karena penelitian ini menitik beratkan pada masalah preferensi minat masyarakat terhadap angkutan umum di kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survei lapangan dengan melihat kondisi transportasi di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Selain itu juga melihat pola tata guna lahan, karakteristik pelaku perjalanan, preferensi pelaku perjalanan dan analisis *demand* angkutan umum. Survei lapangan dilakukan selama 5 hari. Setelah semua data diperoleh dari objek penelitian lalu disesuaikan dengan regulasi standar pelayanan minimum angkutan umum. Hasil survei yang didapat dirangkum menjadi preferensi masyarakat Kota Pelaihari dalam penggunaan angkutan umum sebagai angkutan perkotaan utama. Ruang lingkup penelitian meliputi identifikasi dan inventarisasi peraturan yang terkait dengan tujuan studi, data dan informasi yang dapat diperoleh masyarakat, identifikasi potensi permasalahan, analisis dan evaluasi, serta rekomendasi. Data survei kepada calon pengguna angkutan umum di Kota Pelaihari dianalisis dengan metode statistik dan dikuantitatifkan berdasarkan hasil analisis statistik, kemudian dilihat dimensi mana yang menjadi preferensi masyarakat untuk dibuat rekomendasi. Untuk menganalisa dalam merencanakan sistem pelayanan angkutan penumpang umum, peneliti menggunakan pedoman teknis penyelenggaraan angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur seperti yang tercantum dalam SK. 687/AJ.206/DRJD/2002 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Pola Tata Guna Lahan

Dalam proses perencanaan transportasi, menurut Munawar (2011) zonasi ditentukan berdasarkan wilayah administrasi, ketersediaan jaringan jalan serta homogenitas guna lahan utamanya yaitu kawasan permukiman, kawasan niaga dan kawasan pusat pemerintahan. Secara Administrasi Kecamatan Pelaihari merupakan Ibukota Kabupaten Tanah Laut. Kecamatan Pelaihari memiliki desa/kelurahan sebanyak 15 desa dan 5 kelurahan. Dalam penentuan zona peneliti mengacu pada desa/kelurahan di Kecamatan

Pelaihari sehingga ada 20 zona internal atau desa dan kelurahan serta 2 zona eksternal atau kecamatan (**Tabel 1**).

B. Karakteristik Pelaku Perjalanan

Kota Pelaihari belum memiliki angkutan umum, maka dalam menentukan pola pergerakan perjalanan dilakukan survei pada karakteristik pelaku perjalanan yang sesuai dengan masyarakat di Kecamatan Pelaihari. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Kecamatan Pelaihari yang berjumlah 74.372 orang. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut Sugiyono (2011). Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 74.372 orang, sehingga *error tolerance* yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{74.372}{1 + 74.372 (0.10)^2} \dots\dots\dots (1)$$

$$n = 99,86 \text{ responden}$$

Berdasarkan jumlah sampel yang diperoleh maka peneliti melakukan survei kepada 100 responden, hasil ini diperoleh dari pembulatan n yang didapat 99,86 responden terkait karakteristik angkutan dan preferensi pelaku perjalanan di Kota Pelaihari.

C. Preferensi Pelaku Perjalanan

Dalam penelitian ini, survei preferensi pelaku perjalanan bertujuan menentukan karakteristik angkutan umum yang tepat dan sesuai dengan keinginan masyarakat di Kota Pelaihari. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 100 responden, 98% masyarakat Kota Pelaihari setuju akan penyediaan pelayanan angkutan kota dengan trayek tetap dan teratur dan diketahui dari 98% masyarakat yang setuju akan penyediaan angkutan umum penumpang oleh pemerintah diketahui 91% masyarakat menyatakan bersedia untuk beralih menggunakan angkutan umum tersebut (**Gambar 1**).

D. Analisis Demand

Dalam menentukan sistem pelayanan angkutan penumpang umum maka diperlukan penentuan batas wilayah angkutan penumpang umum tersebut. Suatu daerah dapat dilayani oleh angkutan umum jika jumlah permintaan angkutan penumpang umum lebih besar dari jumlah penumpang minimal per kendaraan. Adapun beberapa tahap dalam menentukan menentukan titik terjauh pelayanan angkutan penumpang umum antara lain:

Tabel 1.
Pembagian Zona Kota Pelaihari

Zona	Desa/Kelurahan	Penduduk	Keterangan Zona
1	Sungai Riam	Desa	Internal
2	Kampung Baru	Desa	Internal
3	Sumber Mulia	Desa	Internal
4	Tampang	Desa	Internal
5	Sarang Halang	Kelurahan	Internal
6	Bumi Jaya	Desa	Internal
7	Atu-Atu	Desa	Internal
8	Angsau	Kelurahan	Internal
9	Pelaihari	Kelurahan	Internal
10	Karang Taruna	Kelurahan	Internal
11	Telaga	Desa	Internal
12	Guntung Besar	Desa	Internal
13	Panjaratan	Desa	Internal
14	Tungkaran	Desa	Internal
15	Panggung	Desa	Internal
16	Pabahanan	Kelurahan	Internal
17	Ambungan	Desa	Internal
18	Panggung Baru	Desa	Internal
19	Ujung Batu	Desa	Internal
20	Pemuda	Desa	Internal
21	Bajui	Kecamatan	Eksternal
22	Bati-bati	Kecamatan	Eksternal

Sumber: BPS Kecamatan Pelaihari, 2018

1. Menghitung Besarnya Permintaan Pelayanan Angkutan Umum Penumpang Kota Pada Kelurahan-kelurahan

Jumlah kendaraan bermotor Kecamatan Pelaihari pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1.297 kendaraan. Perbandingan jumlah kendaraan bermotor dengan jumlah penduduk Kecamatan Pelaihari pada Tahun 2017 sebesar 0,02 % pertahun. Untuk menentukan jumlah kendaraan pribadi masing-masing kelurahan di kecamatan Pelaihari digunakan perbandingan antara jumlah penduduk masing-masing kelurahan dengan persentase setiap jenis kendaraan di Kecamatan Pelaihari pada tahun yang sama.

Jumlah penduduk potensial yang melakukan pergerakan dalam kajian ini yaitu penduduk yang berusia 5-65 tahun dimana berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 diketahui jumlah penduduk yang berpotensi melakukan pergerakan sebanyak 285.787 jiwa yaitu 85,5% dari jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut. Jumlah penduduk yang berpotensi melakukan pergerakan pada

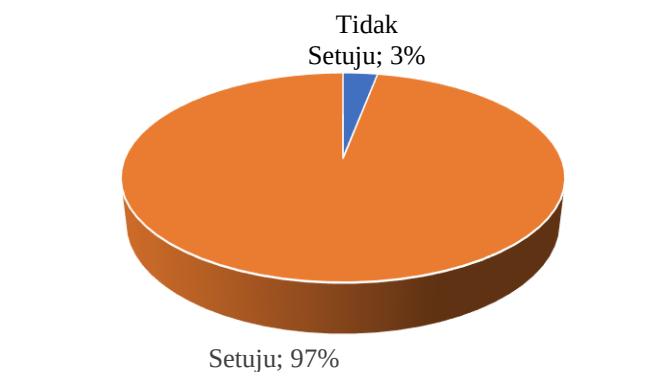
kelurahan (P dalam jiwa) dihitung berdasarkan persentase jumlah penduduk masing-masing kelurahan dari jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut dikalikan dengan jumlah penduduk yang berpotensi melakukan pergerakan (Pm dalam jiwa), seperti pada **Tabel 2**.

Jumlah penduduk Kecamatan Pelaihari yang berpotensi melakukan pergerakan sebanyak 63.574 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk yang berpotensi melakukan pergerakan maka dapat diketahui kemampuan pelayanan kendaraan pribadi masing-masing jenis kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) yang dikalikan dengan jumlah penumpang yang diangkut. Jumlah penumpang yang diangkut kendaraan pribadi berdasarkan kapasitas angkut dengan asumsi mobil mengangkut 3 orang (C_1) dan sepeda motor mengangkut 2 orang (C_2).

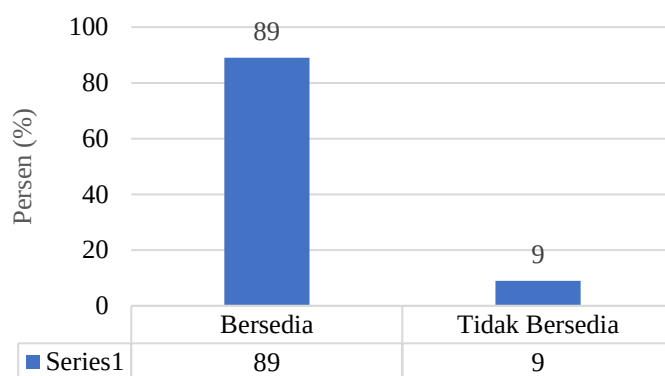
Sebelum menghitung kemampuan pelayanan, peneliti menghitung jumlah permintaan pelayanan dengan menggunakan rumus:

$$K = \frac{v}{p} \dots\dots\dots (2)$$

Pemerintah Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum



Berpindah Menggunakan Angkutan



Gambar 1.
Persentase Pelayanan.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk yang Berpotensi Melakukan Pergerakan

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perbandingan Penduduk Tanah Laut (%)	Pm (Jiwa)
Sungai Riam	3.359	1,00	2.871
Kampung Baru	1.355	0,41	1.158
Sumber Mulia	1.624	0,49	1.388
Tampang	1.163	0,35	994
Sarang Halang	6.476	1,94	5.536
Bumi Jaya	2.363	0,71	2.020
Atu-Atu	3056	0,91	2.612
Angsau	13770	4,12	11.771
Pelaihari	11065	3,31	9.458
Karang Taruna	8649	2,59	7.393
Telaga	2547	0,76	2.177
Guntung Besar	522	0,16	446
Panjaratan	1036	0,31	886
Tungkaran	788	0,24	674
Panggung	5171	1,55	4.420
Pabahanan	2626	0,79	2.245
Ambungan	2054	0,61	1.756
Panggung Baru	1519	0,45	1.298
Ujung Batu	2895	0,87	2.475
Pemuda	2334	0,70	1.995
Total	74.372	22	63.574

Keterangan: Pm = Jumlah Penduduk potensial melakukan Pergerakan

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dimana K adalah angka kepemilikan kendaraan pribadi; V adalah jumlah kendaraan pribadi; dan P adalah jumlah penduduk seluruhnya.

Lalu setelah diolah dihitung kemampuan pelayanan kendaraan pribadi sama dengan kemampuan pribadi untuk melayani jumlah penduduk potensial yang melakukan pergerakan (**Tabel 3**), menggunakan rumus:

$$L = K.PmC \dots\dots\dots (3)$$

Dimana L adalah kemampuan pelayanan kendaraan pribadi; K adalah angka pemilikan kendaraan pribadi; Pm adalah jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan; dan C adalah jumlah penumpang yang diangkut oleh kendaraan pribadi.

Untuk menghitung jumlah penumpang angkutan umum dibutuhkan faktor kali (ftr) besarnya jumlah penduduk potensial melakukan pergerakan yang membutuhkan pelayanan angkutan umum penumpang. Faktor kali dimaksud haruslah sesuai dengan kondisi/tipe kota, dimana untuk kecamatan

Pelaihari digunakan faktor kali 2 dengan asumsi setiap penduduk melakukan perjalanan pergi-pulang setiap hari. Faktor (ftr) tersebut dikalikan dengan jumlah kemampuan potensi yang membutuhkan pelayanan angkutan umum penumpang. Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat diketahui jumlah permintaan angkutan umum penumpang (D) pada Kecamatan Pelaihari (**Tabel 4**).

2. Menghitung Jumlah Penumpang Minimal untuk Mencapai Titik Impas

Jumlah penduduk kecamatan pelaihari sebanyak 74.372 penduduk yaitu kurang dari 100.000 penduduk sehingga penentuan jenis angkutan berdasarkan ukuran kota dan trayek umum diketahui bahwa jenis angkutan untuk kecamatan pelaihari yaitu bus sedang, bus kecil dan mpu (hanya roda empat), sebagaimana **Tabel 5**.

3. Menentukan Batas Wilayah Pelayanan Kota

Suatu daerah dapat dilayani angkutan umum penumpang jika jumlah kebutuhan kendaraan

Tabel 3.
Kemampuan Pelayanan Kendaraan Pribadi di Kecamatan Pelaihari

Jenis Kendaraan	K	Pm	C	L
Mobil	0,004	63.574	3	763
Sepeda Motor	0,013	63.574	2	1.653

Tabel 4.
Permintaan Pelayanan Angkutan Penumpang di Kecamatan Pelaihari

Desa/Kelurahan	P	Pm	V ₁	V ₂	K ₁	K ₂	L ₁	L ₂	M	D
Sungai Riam	3.359	2.871	13	42	0,004	0,013	33	72	2.767	5.534
Kampung Baru	1.355	1.158	5	18	0,004	0,013	14	30	1.114	2.229
Sumber Mulia	1.624	1.388	6	21	0,004	0,013	17	36	1.335	2.671
Tampang	1.163	994	5	15	0,004	0,013	12	26	956	1.913
Sarang Halang	6.476	5.536	26	84	0,004	0,013	66	144	5.325	10.651
Bumi Jaya	2.363	2.020	9	31	0,004	0,013	24	53	1.943	3.886
Atu-Atu	3.056	2.612	12	40	0,004	0,013	31	68	2.513	5.026
Angsau	13.770	11.771	55	179	0,004	0,013	141	306	11.323	22.647
Pelaihari	11.065	9.458	44	144	0,004	0,013	114	246	9.099	18.198
Karang Taruna	8.649	7.393	35	112	0,004	0,013	89	192	7.112	14.225
Telaga	2.547	2.177	10	33	0,004	0,013	26	57	2.094	4.189
Guntung Besar	522	446	2	7	0,004	0,013	5	12	429	859
Panjaratan	1.036	886	4	13	0,004	0,013	11	23	852	1.704
Tungkaran	788	674	3	10	0,004	0,013	8	18	648	1.296
Panggung	5.171	4.420	21	67	0,004	0,013	53	115	4.252	8.505
Pabahanan	2.626	2.245	11	34	0,004	0,013	27	58	2.159	4.319
Ambungan	2.054	1.756	8	27	0,004	0,013	21	46	1.689	3.378
Panggung Baru	1.519	1.298	6	20	0,004	0,013	16	34	1.249	2.498
Ujung Batu	2.895	2.475	12	38	0,004	0,013	30	64	2.381	4.761
Pemuda	2.334	1.995	9	30	0,004	0,013	24	52	1.919	3.839

angkutan penumpang umum lebih besar dari jumlah kendaraan minimal untuk pengusaha angkutan umum penumpang. Jumlah kebutuhan kendaraan angkutan penumpang umum dapat dihitung dari perbandingan jumlah permintaan perhari dengan jumlah kendaraan minimal perhari (Tabel 6).

Jika $N < R$, suatu daerah tidak dapat dimasukan ke dalam wilayah pelayanan angkutan umum. Jika $N > R$ suatu daerah dapat menjadi bagian wilayah pelayanan angkutan umum. Proses itu dilakukan terhadap kelurahan-kelurahan yang berada di dalam batas wilayah terbangun kota berurutan menjauhi pusat kota, sampai pada kelurahan yang mempunyai nilai $N < R$. Kelurahan terluar sebelum kelurahan yang mempunyai nilai $N > R$ merupakan kelurahan terluar dalam wilayah pelayanan angkutan umum

penumpang kota. Untuk kecamatan pelahari berdasarkan perhitungan jumlah kendaraan maka diperoleh beberapa wilayah yang dapat di lakukan pelayanan pelayanan angkutan penumpang umum pada wilayah ini (Tabel 7, 8, 9).

IV. Kesimpulan

Dari keseluruhan data survei dengan responden sebanyak 100 orang, sekitar 91% masyarakat bersedia untuk beralih menggunakan angkutan umum yang akan disediakan oleh pemerintah dengan trayek tetap dan teratur. Jumlah penduduk yang berpotensi melakukan pergerakan 85,5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut. Jika dilihat dari jumlah penduduk kecamatan Pelaihari dengan membandingkan ukuran kota Pelaihari maka dalam menentukan jenis angkutan maka

Tabel 5.
Jumlah Penumpang Minimal Untuk Kendaraan Angkutan Umum

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Penumpang Minimal Perhari (Pmin)	Jumlah Minimum (R)
1.	Bus Sedang	500	20 unit
2.	Bus Kecil	400	20 unit
3.	MPU (hanya roda empat)	250	20 unit

Sumber: SK.687/AJ.206/DRJD/2002

Tabel 6.
Jumlah Kebutuhan Kendaraan di Kecamatan Pelaihari

Desa/Kelurahan	D	Bus Sedang		Bus Kecil		MPU	
		Pmin	N	Pmin	N	Pmin	N
Sungai Riam	5.512	500	11	400	14	250	22
Kampung Baru	2.219	500	4	400	6	250	9
Sumber Mulia	2.660	500	5	400	7	250	11
Tampang	1.905	500	4	400	5	250	8
Sarang Halang	10.606	500	21	400	27	250	42
Bumi Jaya	3.870	500	8	400	10	250	15
Atu-Atu	5.005	500	10	400	13	250	20
Angsau	22.553	500	45	400	56	250	90
Pelaihari	18.122	500	36	400	45	250	72
Karang Taruna	14.165	500	28	400	35	250	57
Telaga	4.172	500	8	400	10	250	17
Guntung Besar	855	500	2	400	2	250	3
Panjaratan	1.697	500	3	400	4	250	7
Tungkaran	1.291	500	3	400	3	250	5
Panggung	8.469	500	17	400	21	250	34
Pabahanan	4.301	500	9	400	11	250	17
Ambungan	3.364	500	7	400	8	250	13
Panggung Baru	2.488	500	5	400	6	250	10
Ujung Batu	4.741	500	9	400	12	250	19
Pemuda	3.823	500	8	400	10	250	15

Keterangan:

D : jumlah permintaan per hari

Pmin : jumlah penumpang minimal per hari per kendaraan

N : jumlah kebutuhan kendaraan

Tabel 7.
Titik Pelayanan Angkutan Bus Sedang di Kecamatan Pelaihari

Desa/Kelurahan	D	Pmin	N	Keterangan
Sarang Halang	10.606	500	21	Memenuhi
Angsau	22.553	500	45	Memenuhi
Pelaihari	18.122	500	36	Memenuhi
Karang Taruna	14.165	500	28	Memenuhi

Keterangan:

D : jumlah permintaan per hari

Pmin : jumlah penumpang minimal per hari per kendaraan

N : jumlah kebutuhan kendaraan

Tabel 8.
Titik Pelayanan Angkutan Bus Kecil di Kecamatan Pelaihari

Desa/Kelurahan	D	Pmin	N	Keterangan
Sarang Halang	10.606	400	27	Memenuhi
Angsau	22.553	400	56	Memenuhi
Pelaihari	18.122	400	45	Memenuhi
Karang Taruna	14.165	400	35	Memenuhi
Panggung	8.469	400	21	Memenuhi

Tabel 9.
Titik Pelayanan Angkutan MPU di Kecamatan Pelaihari

Desa/Kelurahan	D	Pmin	N	Keterangan
Sungai Riam	5.512	250	22	Memenuhi
Sarang Halang	10.606	250	42	Memenuhi
Atu-Atu	5.005	250	20	Memenuhi
Angsau	22.553	250	90	Memenuhi
Pelaihari	18.122	250	72	Memenuhi
Karang Taruna	14.165	250	57	Memenuhi
Panggung	8.469	250	34	Memenuhi

jenis angkutan untuk kecamatan pelaihari yaitu Bus Sedang, Bus Kecil dan MPU (hanya roda empat). Selain itu juga perlu pembangunan halte secara bertahap kedepannya agar pemberhentian bus lebih tertib dan teratur.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. 2017. *Studi Teknis Kebutuhan Angkutan Antar Jemput Dalam Propinsi Kalimantan Selatan*. Online. <file:///D:/Downloads/614-1755-1-SP.pdf>. Diakses 7 Mei 2019
- BPS Kabupaten Tanah Laut. 2018. *Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2018*. Pelaihari: CV. Karya Bintang Musim.
- Hartanto, Budi Dwi. 2018. *Penetapan Trayek Angkutan Umum Berbasis Jalan di Pulau Nunukan*. Kajian Kecil. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 20156. *Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanah Laut*. Laporan Akhir. Pelaihari.
- Munawar, Ahmad. 2011. *Dasar-dasar Transportasi*. Yogyakarta: Beta Offset
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor dalam Trayek*. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.